



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RADEN RARA ENDANG LUKITANINGSIH
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN, ASET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 732645

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 985.450.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/198 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m²/100 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/45 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 2.977 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
5. Tanah Seluas 196 m² di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 315.500.000

1. MOTOR, HONDA MOTOR BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, HONDA CR-V RM 1 2WD 2.0 AT CKD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO 1.5 E CVT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 124.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.771.600

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 312.717.899

**F. HARTA LAINNYA****Sub Total****Rp.** ----**Rp.** 1.694.439.499**III. HUTANG****Rp.** 203.861.500**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp.** 1.490.577.999**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.